

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA  
PERIMBANGAN TERHADAP BELANJA MODAL  
DENGAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN  
SEBAGAI VARIABEL MODERASI PADA PEMERINTAH KOTA  
DAN KABUPATEN PROVINSI SUMATERA UTARA**

---

**Benny Rojeston Marnaek Nainggolan, Hantono**

**Dosen Universitas Prima Indonesia**

**(Naskah diterima: 8 Januari 2018, disetujui: 19 Januari 2018)**

*Abstract*

*This study examines the effect of Local Revenue and Balancing Fund on Capital Expenditure with Time Over Budget Calculation as a moderating variable. The sample in this research are 33 regencies and cities in North Sumatera Province with year of research 2013-2015. In this research using quantitative research approach, descriptive research type, descriptive explanatory research, secondary data type. This study also uses Moderating Regression Analysis (MRA) to test the moderation variables in this study. Partially Local Revenue has significant effect to Capital Expenditure, Balancing Fund has significant effect to Capital Expenditure. Simultaneously Local Revenue and Balancing Fund have significant effect to Capital Expenditure. The Over Time Budget Calculation (SiLPA) moderates the Local Revenue and the Balancing Fund partially and simultaneously moderates the Capital Expenditure to the City and Regency Governments in North Sumatra Province in 2013-2015.*

**Keywords:** *Local Revenue, Balancing Fund, Capital Expenditure and Time Over Budget Calculations.*

**Abstrak**

Penelitian ini menguji pengaruh Dana Pendapatan dan Pendapatan Daerah terhadap Belanja Modal dengan Perhitungan Anggaran Lebih Lama sebagai variabel moderating. Sampel dalam penelitian ini adalah 33 kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Utara dengan tahun penelitian 2013-2015. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif, jenis penelitian deskriptif, penelitian deskriptif explanatory, tipe data sekunder. Penelitian ini juga menggunakan Analisis Regresi Moderat (MRA) untuk menguji variabel moderasi dalam penelitian ini. Sebagian Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal, Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Secara bersamaan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap Capital Expenditure. Perhitungan Anggaran Waktu Lebih Lambat (SiLPA) memoderasi Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan secara parsial dan sekaligus memoderasi Belanja Modal ke Pemerintah Kota dan Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2013-2015.

**Kata kunci:** Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal dan Perhitungan Anggaran Lebih Lama.

## **I. PENDAHULUAN**

**T**ujuan dilaksanakannya desentralisasi fiskal adalah peningkatan pelayanan publik, dimana Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk mengalokasikan belanja modal yang tinggi guna membiayai pembangunan sektor-sektor yang bermanfaat dalam menstimulus perekonomian daerah.

Pemerintah Daerah memiliki wewenang penuh untuk meningkatkan pembangunan daerah atau wilayahnya berdasarkan pendanaan dan penghasilan dari pendapatan daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Salah satu belanja daerah yang terdapat didalam APBD adalah belanja modal, dimana belanja modal ini digunakan untuk membiayai pembangunan-pembangunan yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Dengan merealisasikan belanja modal ini maka akan memberikan efek ganda (*multiplier effect*) terhadap perekonomian di daerah tersebut sehingga pelayanan publik, pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah akan meningkat. Namun kenyataannya pemerintah daerah hanya memiliki ruang fiskal yang sempit didalam membiayai belanja-belanja pemerintah daerah dalam APBD. Untuk itu pemerintah daerah harus

berupaya untuk mengoptimalkan potensi pendapatan daerah untuk alokasi belanja modal. Kemampuan keuangan masing-masing daerah juga sangat berbeda untuk membiayai kegiatan pemerintahnya, hal ini akan memicu terjadinya ketimpangan fiskal antar daerah. Untuk itu pemerintah daerah dapat melakukan pengalokasian dana yang diperoleh dari APBN untuk membiayai belanja daerahnya. Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bahwa Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Sumber pendanaan lainnya untuk alokasi belanja modal penyediaan berbagai fasilitas layanan publik adalah penerimaan daerah yang bersumber dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya. Menurut peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 tahun 2006, SiLPA merupakan sisa dana yang diperoleh dari aktualisasi penerimaan serta pengeluaran anggaran daerah selama satu periode. Dalam penelitian ini peneliti mengambil pendapatan asli daerah dan dana perimbangan sebagai variabel dependen, dan

sisanya lebih perhitungan anggaran sebagai variabel moderasi dimana belanja modal sebagai variabel independen.

## **II. KAJIAN TEORI**

### **2.1 Belanja Modal**

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No.2 Tahun 2011, belanja modal (*Capital Expenditure*) adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap, inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006, belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan. Dari kedua pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan untuk menambah aset tetap yang masa manfaatnya

lebih dari 12 (dua belas) bulan dalam rangka mewujudkan kegiatan pemerintah.

### **2.2 Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah Pendapatan yang diperoleh daerah dan yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan dipergunakan bagi keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

### **2.3 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran**

Di pasal 62 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA) mencakup pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak

ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan

## **2.4 Dana Perimbangan**

Dana perimbangan mencakup Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) (BPK, 2008). Dana perimbangan bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah dan antar Pemerintah Daerah. Dana perimbangan terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus, sedangkan menurut Wijaya (2007), tujuan dari dana perimbangan adalah (1) Terciptanya pemerintahan dengan otonomi yang kuat dan sanggup berjalan dengan kemampuan administrasi sendiri, (2) Tercapainya pelayanan masyarakat yang semakin baik, (3) Kesejahteraan masyarakat yang semakin membaik, (4) Pemerintah daerah mendapatkan jatah dari hasil kerjanya, (5) Tercapainya suatu sistem kerja yang baik antara pemerintah pusat dan daerah, (6) Terdongkranya otonomi daerah dengan keterlibatan operasional oleh pemerintah.

## **III. METODE PENELITIAN**

### **3.1 Variabel Penelitian**

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Belanja Modal dihitung dari total

belanja modal pemerintah kota dan kabupaten. Selanjutnya variabel independen pada penelitian ini adalah pendapatan asli daerah dan dana perimbangan, sedangkan sisa lebih perhitungan anggaran sebagai variabel moderasi.

### **3.2 Penentuan Populasi dan Sampel**

Populasi pada penelitian ini adalah pemerintah kota dan kabupaten di Provinsi Sumatera Utara pada periode tahun 2013 hingga 2015. Model sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah sampel jenuh dimana semua anggota populasi dipilih menjadi sampel.

### **3.3 Metode Analisis**

Model yang akan diuji dalam penelitian ini menggunakan *Moderated Regression Analysis* (MRA). MRA atau uji interaksi merupakan aplikasi khusus regresi linier berganda dimana dalam persamaan regresinya mengandung unsur interaksi atau perkalian antara dua atau lebih variabel independen (Ghozali, 2013).

Model penelitian ini diuraikan berdasarkan persamaan regresi. Persamaan regresi yakni regresi berganda untuk menguji semua hipotesis dalam penelitian antara lain :

#### **1. Hipotesis 1 (H<sub>1</sub>)**

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (X<sub>1</sub>) terhadap Belanja Modal (Y)

$$Y = \alpha + \beta_1 PAD + \varepsilon$$

**2. Hipotesis 2 (H<sub>2</sub>)**

Pengaruh Dana Perimbangan (X<sub>2</sub>) terhadap Belanja Modal (Y)

$$Y = \alpha + \beta_1 \text{ PAD} + \beta_2 \text{ DP} + \varepsilon$$

**3. Hipotesis 3 (H<sub>3</sub>)**

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (X<sub>1</sub>) dan Dana Perimbangan (X<sub>2</sub>) secara bersama-sama terhadap Belanja Modal (Y)

$$Y = \alpha + \beta_1 \text{ PAD} + \beta_2 \text{ DP} + \varepsilon$$

**4. Hipotesis 4 (H<sub>4</sub>) Uji Variabel Moderasi****a. Uji Interaksi**

$$\begin{aligned} \text{Ln BM} = & \alpha + \beta_1 \text{ Ln PAD} + \beta_2 \text{ Ln DP} \\ & + \beta_3 \text{ Ln SiLPA} + \beta_4 \text{ Ln PAD} * \text{Ln SiLPA} + \beta_5 \\ & \text{Ln DP} * \text{Ln SiLPA} + \varepsilon \end{aligned}$$

**b. Uji Selisih Mutlak**

$$Y = \alpha + \beta_1 \text{ PAD} + \beta_2 \text{ DP} + \beta_3 \text{ SiLPA} + \varepsilon$$

**c. Uji Residual**

$$Y = \alpha + \beta \text{ Moderasi\_Residual} + \varepsilon$$

**Keterangan :**

$\alpha$  = Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_5$  = Koefisien Regresi Masing-Masing Variabel

BM = Belanja Modal (Y)

PAD = Pendapatan Asli Daerah (X<sub>1</sub>)

DP = Dana Perimbangan (X<sub>2</sub>)

SiLPA = Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Sebagai Moderating (X<sub>3</sub>)

e = error

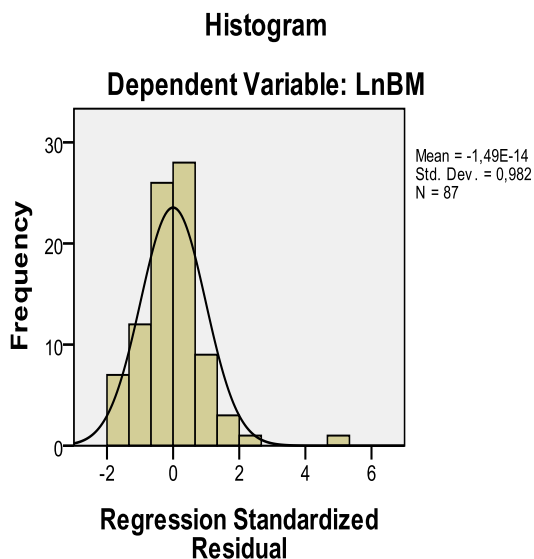
**IV. HASIL PENELITIAN****Analisis Statistik Deskriptif**

Hasil uji statistik deskriptif diatas menunjukkan hasil nilai tertinggi variabel Pendapatan Asli Daerah (X<sub>1</sub>) sebesar Rp1.489.723.189.089 dan nilai minimum Rp7.223.690.779 dengan nilai rata-rata sebesar Rp101.019.711.414,94 dan standar deviasi Rp235.888.490.258,84. Untuk variabel Dana Perimbangan (DP) nilai minimum sebesar Rp137.297.626.397, nilai maksimum sebesar Rp1.598.113.512.931, dengan nilai rata-rata sebesar Rp663.718.180.571,21 sedangkan standar deviasi sebesar Rp303.337.773.312,36. Variabel Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) nilai minimum sebesar Rp(75.861.768.174), nilai maksimum sebesar Rp376.281.581.501, dengan nilai rata-rata sebesar Rp87.125.723.304,07 sedangkan standar deviasi sebesar Rp68.520.052.176,22, dan variabel Belanja Modal (BM) nilai minimum sebesar Rp87.060.355.405, nilai maksimum sebesar Rp916.888.037.908, dengan nilai rata-rata sebesar Rp229.223.753.217,94 sedangkan standar deviasi sebesar Rp147.782.262.648,18.

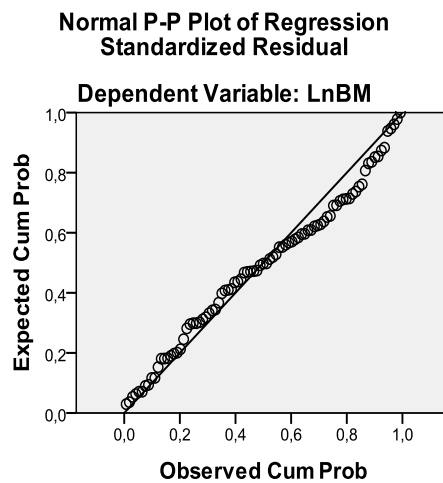
	N	Min	Max	Mean	Std. Dev.
PAD	99	7,22E	1.499,72E	101,02E	235,88E
DP	99	137,29E	1.589,11E	663,71E	303,34E
SiLPA	99	-7,58E	376,28E	87,12E	68,52E
BM	99	87,06E	916,88E	229,22E	147,78E
Valid N (listwise)					

### Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Untuk melihat normalitas residual dilakukan dengan melihat analisis grafik yaitu dengan melihat grafik histogram dan membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati normal dan *normal probability plot* yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal.



Dari hasil pengujian dengan grafik histogram di atas terlihat grafik menunjukkan distribusi data yang normal karena garis melengkung yang terdapat pada histogram menyerupai lonceng yang tidak melenceng ke kiri maupun ke kanan.



Dari grafik normal p-plot di atas terlihat titik-titik menyebar disekitar garis diagonal, serta mengikuti arah garis diagonal. Maka, sesuai dengan hasil grafik normal p-plot di atas data terdistribusi secara normal. Selain menggunakan grafik, untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal dapat dilakukan dengan menggunakan uji statistik non-parametrik Kolmogorov Smirnov. Cara membaca hasil uji Kolmogorov-Smirnov adalah dengan melihat nilai Asymp. Sig (2-tailed) yang apabila lebih besar dari 0,05 maka data terdistribusi secara normal.

Dari hasil uji statistik Kolmogorov-Smirnov, di peroleh nilai signifikan  $0,200 > 0,05$  yang menunjukkan data residual penelitian berdistribusi normal. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa model regresi ini layak digunakan untuk analisis regresi linear berganda.

**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		95
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,36625406
	Absolute	,060
Most Extreme Differences	Positive	,060
	Negative	-,056
Test Statistic		,060
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 <sup>c,d</sup>

a. Test distribution is Normal.

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel independen. Berikut adalah hasil pengujian multikolinearitas:

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	LnPAD	,394	2,540
	LnDP	,411	2,435

LnSiLP	,929	1,077
A		

a. Dependent Variable: LnBM

Hasil pengolahan data penelitian untuk Uji multikolinearitas ditunjukkan dalam tabel 5.3 semua variabel memiliki nilai VIF  $< 10$  dan tingkat toleransi lebih kecil dari angka 1 (atau), artinya bahwa seluruh variabel tidak terjadi multikolinieritas atau tidak ada variabel yang multikolinieritas.

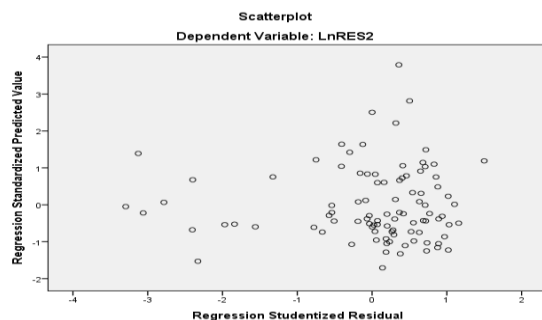
Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada masalah autokorelasi. Model regresi yang baik adalah yang bebas dari autokorelasi. Cara yang digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi adalah dengan melakukan uji Durbin-Watson test (DW test).

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Durbin-Watson
1	,614 <sup>a</sup>	,377	,357	1.901

Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai DW sebesar 1,901 dimana jumlah sampel sebesar 95 ( $n = 95$ ) sementara besarnya K

(jumlah variabel bebas atau independen) sebanyak 3 dengan  $\alpha = 5\%$ , diperoleh nilai dL tabel sebesar 1,602 dan dU tabel sebesar 1,732. Hasil pengujian Durbin-Watson *statistic*  $dL < d < 4-dU$  dimana  $1,602 < 1,901 < 2,268$ , maka dapat disimpulkan bahwa model terbebas dari autokorelasi.

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang Homoskedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas. Salah satu cara yang digunakan untuk mengetahui ada tidaknya heteroskedastisitas dalam suatu model regresi linear berganda adalah dengan melihat grafik *scatterplot* dan uji Glejser.



Berdasarkan grafik *scatterplot* di atas terlihat bahwa titik – titik menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y, hal tersebut menunjukkan tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi. Hasil uji heteroskedastisitas dengan menggunakan uji park ditunjukkan oleh tabel berikut ini :

Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	10,106	11,469		,881	,381
LnPAD	,426	,218	,319	1,952	,054
LnDP	-,774	,507	-,244	-1,526	,131
LnSiLPA	-,055	,219	-,027	-,252	,802

a. Dependent Variable: LnRES2

Berdasarkan tabel diatas tidak terjadi heteroskedastisitas karena seluruh variabel independen tidak signifikan pada kondisi nilai signifikan statistik lebih besar dari nilai  $\alpha = 5\%$  (Nilai Sig *hitung* > 0,05) disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas.

### Pengujian Hipotesis 1 (H1)

Uji statistik secara parsial (Uji t), Pendapatan Asli Daerah ( $X_1$ ) diperoleh  $T_{hitung}$  sebesar 2,546 dengan nilai signifikan 0,013 sedangkan  $T_{tabel}$  yaitu  $n-k-1$  ( $95-3-1 = 91$ ) sebesar 1,661 dengan nilai signifikan 0,05.



Kesimpulannya  $T_{hitung} > T_{Tabel}$  ( $2,546 > 1,661$ ) maka  $H_0$  ditolak  $H_a$  diterima maka variabel Pendapatan Asli Daerah ( $X_1$ ) berpengaruh terhadap Belanja Modal (Y), nilai signifikan sebesar  $0,013 < 0,05$  artinya Pendapatan Asli Daerah berpengaruh tidak signifikan terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kota dan Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara tahun 2013-2015

Model	Standardized Coefficients	t	Sig.
	Beta		
1 (Constant)	11,972	3,657	,000
LnPAD	,159	2,546	,013
LnDP	,340	2,349	,021
LnSiLPA	,037	,584	,561

### Pengujian Hipotesis 2 (H2)

Untuk hipotesis 2 (H2), Dana Perimbangan ( $X_2$ ) diperoleh  $T_{hitung}$  sebesar 2,349 dengan nilai signifikan 0,21 sedangkan  $T_{tabel}$  yaitu  $n-k-1$  ( $95-3-1 = 91$ ) sebesar 1,661 dengan nilai signifikan 0,05. Kesimpulannya  $T_{hitung} > T_{Tabel}$  ( $2,349 > 1,661$ ) maka  $H_0$  ditolak  $H_a$  diterima maka variabel Dana Perimbangan ( $X_2$ ) berpengaruh terhadap Belanja Modal (Y), nilai signifikan sebesar

$0,021 < 0,05$  artinya Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal pada Kota dan Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara selama tahun 2013 – 2015.

### Pengujian Hipotesis 3 (H3)

#### ANOVA

Model	Df	F	Sig.
1 Regression	3	18,374	,000 <sup>a</sup>
Residual	91		
Total	94		

a. Predictors: (Constant), LnSiLPA, LnPAD, LnDP

b. Dependent Variable: LnBM

Hasil Uji-F tabel diatas menunjukkan bahwa nilai variabel independen secara simultan atau bersama-sama yakni variabel Pendapatan Asli Daerah ( $X_1$ ) dan Dana Perimbangan ( $X_2$ ) terhadap Belanja Modal (Y) adalah sebesar 0,000 maka signifikansi  $F_{hitung} < 0,05$  tidak dapat ditolak bahwa secara bersama-sama variabel Pendapatan Asli Daerah ( $X_1$ ) dan Dana Perimbangan ( $X_2$ ) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal (Y) pada Kota dan Kabupaten Provinsi Sumatera Utara selama tahun 2013 – 2015.

#### Pengujian Hipotesis 4 (H4) Uji Variabel Moderasi

Pengujian variabel moderasi dilakukan dengan tiga cara antara lain adalah (1) Uji Interaksi yaitu uji interaksi sering disebut dengan *Moderated Regression Analysis* (MRA). Merupakan aplikasi khusus regresi linier berganda dimana dalam persamaan regresinya mengandung unsur interaksi (perkalian dua atau lebih variabel independen). (2) Uji Nilai Selisih Mutlak yaitu uji yang dilakukan dengan mencari nilai selisih mutlak dari variabel independen. (3) Uji Residual yaitu uji yang dilakukan dengan menguji pengaruh deviasi (penyimpangan) dari suatu model. Fokusnya adalah ketidakcocokan (*lack of fit*) yang dihasilkan dari deviasi hubungan antar variabel independen.

#### Uji Interaksi

Variabel moderasi diuji melalui interaksi variabel independen dengan variabel moderating untuk mengetahui apakah hasil pengujian memperkuat atau memperlemah secara signifikan. Tabel dibawah menunjukkan nilai uji variabel moderating dengan interaksi antar variabel sebagai berikut:

Model	Unstandardized Coefficients	T	Sig.
	Beta		
1 (Constant)	13,758	4,923	,000
PAD	-5,437	-3,262	,002
DP	5,397	3,543	,001
Interaksi PADSiLPA	,221	3,358	,001
Interaksi DPSiLPA	-,201	-3,332	,001

a. Dependent Variable: LnBM

Berdasarkan tabel diatas nilai signifikansi hasil interaksi variabel pendapatan asli daerah dengan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran sebagai variabel moderating (PAD\*SiLPA) sebesar 0,001 dan nilai  $\beta$  positif sebesar 0,221, artinya bahwa variabel moderasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) memperkuat pengaruh secara positif dari Pendapatan Asli Daerah ( $X_1$ ) terhadap Belanja Modal (Y), pengaruhnya juga signifikan ( $0,001 < 0,05$ ). Kesimpulannya adalah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) memoderasi Pendapatan Asli Daerah ( $X_1$ ) terhadap Belanja Modal.

Hasil pengujian interaksi variabel Dana Perimbangan ( $X_2$ ) dengan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran sebagai variabel moderating (DP\*SiLPA) nilai signifikansi sebesar  $0,001 < 0,05$  dan hasilnya  $\beta$  negatif

sebesar -0,201, artinya bahwa variabel moderasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran memperkuat pengaruh secara negatif dari Dana Perimbangan ( $X_2$ ) terhadap Belanja Modal ( $Y$ ). Kesimpulannya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) memoderasi Dana Perimbangan ( $X_2$ ) terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kota dan Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara.

#### Uji Nilai Selisih Mutlak

Nilai selisih mutlak dilakukan untuk menguji selisih nilai mutlak dilakukan dengan cara mencari selisih nilai mutlak terstandarisasi diantara kedua variabel bebasnya. Jika selisih nilai mutlak diantara kedua variabel bebasnya tersebut signifikan positif maka variabel tersebut memoderasi hubungan antara variabel bebas dan variabel tergantungnya.

Model	Standardized Coefficient	t	Sig.
	Beta		
1 (Constant)	25,936	454,716	,000
Zscore (PAD)	,096	1,585	,116
Zscore (DP)	,192	3,125	,002
Zscore (SiLPA)	,187	2,205	,030

Hasil pengujian nilai selisih mutlak yang ditunjukkan dalam tabel diatas adalah nilai koefisien regresi positif (0,187) dan signifikan ( $0,03 < 0,05$ ) artinya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) memoderasi hubungan antara Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kota dan Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara tahun 2013-2015

#### V. KESIMPULAN

Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kota dan Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara tahun 2013 – 2015.
2. Dana Perimbangan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kota dan Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara selama tahun 2013–2015.
3. Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kota dan Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara tahun 2013– 2015.
4. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) memoderasi Pendapatan Asli Daerah terhadap

Belanja Modal dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal serta memoderasi Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kota dan Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara tahun 2013 - 2015

**DAFTAR PUSTAKA**

- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Edisi VII. Universitas Diponegoro. Semarang
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Erlangga. Jakarta
- Nordiawan, D. dan Hertianti, A. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat. Edisi 2. Jakarta
- Standar Akuntansi Pemerintahan, 2011, Tim Fokus Media.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian, Kombinasi Mixed Methods*. Alfabeta. Bandung.
- Widjaja, HAW., 2007, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Andriana. 2008. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2004-2007. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*.
- Novianto, R. 2015. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Ekonomi*. Vol. 4. No. 1. Hal. 1-22.
- Purwanto, D. 2015. Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Domestik Regional Bruto terhadap Realisasi Belanja Modal. *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi*. Vol. 11. No. 2. Hal. 263-271.
- Permana, DY. dan Rahardjo, SN. 2013. Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah). *Diponegoro Journal of Accounting*. Vol. 2. No. 4. Hal. 1-10.